



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke : 4 (empat)/ Panja ke : 1 (satu)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan :
1. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
 2. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
 4. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
 5. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI;
 6. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
 8. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
- Sifat Rapat : Tertutup
- Hari/tanggal : Rabu, 18 November 2020
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara :
1. Kebijakan Pemerintah di bidang pre-market dan post-market alat kesehatan di Indonesia.
 2. Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas alat kesehatan untuk menuju kemandirian

industri alat kesehatan dalam negeri.

3. Pengadaan kebutuhan alat kesehatan melalui e-katalog.
4. Kebijakan Pemerintah dalam inovasi teknologi alat Kesehatan.

- Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/ Pimpinan Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan.
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP / Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat
Hadir dan Virtual : A. 19 orang dari 27 orang Anggota Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan
B. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt.M.BioMed;
C. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: Prof. Dr. H. Abdul Kadir PhD, Sp.THT-KL(K), MARS.;
D. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: dr. Slamet, MPH.;
E. Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI: Putut Hadi S;
F. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan RI: Yon Arsal;
G. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI: Johni Martha;
H. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): Sarah Sadiqa;
I. Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): Yulianto Prihandoyo.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dibuka pukul

secara tatap muka dan virtual, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN

Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan mengapresiasi masukan dari Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk kemudian menjadi bahan masukan untuk Panja Tata Kelola Alat Kesehatan, dalam merumuskan rekomendasi panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB.